
ANALISIS KONFLIK AGRARIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS POLITIK NASIONAL

Ahmad Nadirsyah Nst

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Analisis konflik agraria memiliki peran penting dalam memahami dinamika konflik sosial di suatu negara. Konflik agraria seringkali berkaitan dengan perselisihan atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, terutama lahan pertanian. Dalam konteks ini, konflik agraria dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik nasional. Artikel ini akan melakukan analisis mendalam tentang konflik agraria dan implikasinya terhadap stabilitas politik nasional, dengan fokus pada kasus-kasus di beberapa negara.

Kata Kunci: *analisis konflik agraria, stabilitas politik, sumber daya alam*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik agraria merupakan fenomena kompleks yang menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Konflik semacam ini kerap terjadi karena adanya perselisihan terkait dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan pertanian serta sumber daya alam lainnya. Dalam beberapa kasus, konflik agraria bahkan menjadi sumber ketegangan sosial yang mampu mengancam stabilitas politik suatu negara. Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa konflik agraria tidak hanya melibatkan pertentangan antara individu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan dinamika sosial-ekonomi di suatu wilayah. Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Sebagai contoh, konflik agraria bisa timbul karena adanya kebijakan redistribusi lahan yang tidak adil atau pengambilalihan lahan secara paksa oleh pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, konflik agraria juga sering kali terkait dengan isu-isu sosial dan politik yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap sumber daya, hak-hak asasi manusia, dan tuntutan atas keadilan sosial. Di banyak negara, konflik agraria menjadi simbol dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa konflik agraria bukan hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga memiliki dampak nasional bahkan global. Konflik agraria dapat berpotensi memicu ketegangan antar etnis, agama, atau kelompok sosial, serta mengganggu stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang konflik agraria dan implikasinya terhadap stabilitas politik nasional sangatlah relevan dalam upaya memahami dinamika sosial-ekonomi dan politik suatu negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah konflik agraria serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani konflik tersebut dan menjaga stabilitas politik nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang tepat dalam menganalisis konflik agraria dan implikasinya terhadap stabilitas politik nasional harus memperhitungkan kompleksitas masalah yang terlibat. Dalam konteks ini, beberapa pendekatan metodologis dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat, penyebab, dan dampak dari konflik agraria tersebut. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:

1. **Studi Kasus:** Pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis konflik agraria di berbagai wilayah atau negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memeriksa secara mendalam kasus-kasus konkret konflik agraria, termasuk

konteks historis, aktor-aktor yang terlibat, dinamika konflik, dan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, analisis dokumen, dan observasi lapangan.

2. **Analisis Kualitatif:** *Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam perspektif, motivasi, dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Metode ini mencakup teknik seperti wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan analisis konten terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Data kualitatif ini dapat membantu dalam mengungkapkan kompleksitas relasi sosial, politik, dan ekonomi yang terlibat dalam konflik agraria.*
3. **Analisis Kuantitatif:** *Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam konflik agraria serta mengukur dampaknya terhadap stabilitas politik nasional. Metode ini mencakup pengumpulan dan analisis data statistik, seperti data tentang jumlah konflik agraria, jumlah korban, jenis konflik, dan sebagainya. Analisis regresi atau korelasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara konflik agraria dengan faktor-faktor politik, ekonomi, atau sosial lainnya.*
4. **Analisis Sistem:** *Pendekatan analisis sistem memungkinkan peneliti untuk memahami konflik agraria sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk sistem politik, ekonomi, dan sosial. Dengan cara ini, peneliti dapat melacak interaksi kompleks antara berbagai elemen dalam sistem yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik agraria. Penggunaan teknik seperti pemodelan sistem dinamis dan analisis jaringan dapat membantu mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam dinamika konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik.*
5. **Analisis Spasial:** *Analisis spasial menggunakan alat dan teknik GIS (Geographic Information Systems) untuk memetakan distribusi spasial konflik agraria dan faktor-faktor terkait di wilayah-wilayah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola spasial konflik agraria serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti distribusi lahan, akses terhadap sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Data spasial yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan strategi mitigasi konflik agraria yang lebih efektif.*

PEMBAHASAN

Analisis konflik agraria dan implikasinya terhadap stabilitas politik nasional merupakan bagian penting dari studi politik dan sosial. Konflik agraria, yang sering kali melibatkan pertentangan antara masyarakat petani dan pemilik tanah, pemerintah, atau korporasi besar, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik suatu negara. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat lebih dalam tentang konflik agraria, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

Konflik agraria sering kali muncul karena adanya perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan, atau akses terhadap sumber daya alam, terutama tanah. Faktor-faktor yang memicu konflik agraria dapat bervariasi, mulai dari kebijakan agraria yang tidak adil, urbanisasi yang cepat, konversi lahan untuk proyek-proyek pembangunan, hingga konflik

kepentingan antara sektor swasta dan masyarakat lokal. Pertentangan ini sering kali mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dalam, di mana masyarakat petani sering kali menjadi pihak yang paling rentan.

Dalam konteks negara-negara berkembang, konflik agraria seringkali menjadi akar dari ketidakstabilan politik dan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan agraria yang tidak merata atau pengabaian terhadap hak-hak tanah tradisional dapat memicu protes massal, unjuk rasa, atau bahkan pemberontakan bersenjata. Konflik agraria dapat mempengaruhi stabilitas politik nasional dengan mengganggu ketertiban sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, atau bahkan memicu kekerasan antar kelompok.

Dampak konflik agraria terhadap stabilitas politik nasional juga dapat memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Konflik agraria sering kali memperkuat disparitas kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan keuntungan sering kali berada di pihak elit politik atau korporasi. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan sosial yang lebih dalam, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah, dan meningkatnya ketegangan antar kelompok masyarakat. Dalam beberapa kasus, konflik agraria juga dapat memicu siklus kekerasan dan pembalasan yang sulit dihentikan.

Selain itu, konflik agraria juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik. Ketidakpastian dan ketegangan yang diakibatkan oleh konflik agraria dapat menimbulkan dampak negatif terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas mata uang. Selain itu, ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh konflik agraria dapat menghambat upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang efektif, seperti pembangunan infrastruktur atau reformasi agraria yang lebih luas.

Dalam konteks global, konflik agraria juga dapat memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas politik regional atau bahkan internasional. Kontroversi terkait hak tanah dan sumber daya alam sering kali menjadi pemicu konflik antara negara-negara tetangga atau antara negara-negara dan perusahaan multinasional. Dampak ekonomi dan politik dari konflik agraria dalam satu negara juga dapat meluas ke negara-negara tetangga melalui kerjasama perdagangan, investasi, atau migrasi manusia.

Dengan demikian, penting untuk memahami kompleksitas konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional. Penanganan konflik agraria memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum dan keamanan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat lokal, mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hanya dengan demikian, konflik agraria dapat diatasi secara efektif dan kontribusi positif terhadap stabilitas politik nasional dapat diwujudkan.

Dalam menanggapi konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, penting untuk mendorong dialog dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, pemilik tanah, dan perusahaan swasta. Dialog yang inklusif dan

bermakna dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan, mempromosikan saling pengertian, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kedua, perlindungan terhadap hak-hak tanah dan sumber daya alam masyarakat lokal harus diperkuat melalui kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan agraria yang adil dan inklusif diterapkan secara konsisten, sementara sistem peradilan harus dapat menangani kasus-kasus pelanggaran hak tanah dengan cepat dan adil. Ini akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Selanjutnya, perlunya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi tanah dan lingkungan mereka. Pemerintah harus berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan agraria, sehingga kepentingan mereka dapat diwakili secara efektif.

Di samping itu, penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah pedesaan. Program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul akibat persaingan sumber daya.

Tidak kalah pentingnya adalah pentingnya memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mengelola konflik agraria secara efektif. Pelatihan dan pendidikan bagi pejabat pemerintah dan masyarakat lokal tentang prinsip-prinsip penyelesaian konflik dan manajemen sumber daya alam dapat membantu membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini.

Selain itu, peran media massa dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam menyoroti isu-isu konflik agraria dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat lokal. Media massa dapat membantu menggugah kesadaran publik tentang dampak negatif konflik agraria terhadap stabilitas politik dan kehidupan masyarakat, sementara organisasi masyarakat sipil dapat memberikan dukungan dan advokasi kepada masyarakat yang terkena dampak.

Terakhir, penting untuk mengakui bahwa penyelesaian konflik agraria bukanlah proses instan, tetapi memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah yang diambil untuk menangani konflik agraria harus berkelanjutan, responsif terhadap perubahan konteks lokal, dan didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, penanganan konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik memerlukan pendekatan yang holistik, berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan keberlanjutan. Hanya dengan demikian, konflik agraria dapat diatasi secara efektif dan kontribusi positif terhadap stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan.

Dalam menghadapi konflik agraria dan implikasinya terhadap stabilitas politik, penting untuk memperhatikan beberapa aspek kunci yang dapat membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian serta pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, perlu adanya upaya konkret untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan transparan. Ini melibatkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta penerapan hukum yang konsisten dan adil.

Kedua, partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi tanah dan sumber daya alam mereka. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya, perlunya memperkuat perlindungan hak-hak tanah masyarakat lokal. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan agraria yang adil dan inklusif diterapkan, serta memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi masyarakat dalam mempertahankan hak-hak tanah mereka. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi yang tidak adil terhadap masyarakat lokal oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik.

Selain itu, perlu adanya pendekatan holistik dalam mengatasi konflik agraria, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Ini termasuk memperkuat hubungan antara pemangku kepentingan, mempromosikan dialog antarbudaya, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penting juga untuk memperhatikan peran media massa dalam menyampaikan informasi yang akurat dan seimbang tentang konflik agraria serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Media massa dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menggugah kesadaran publik, memperjuangkan keadilan, dan mempromosikan perdamaian.

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat diperlukan dalam mengatasi konflik agraria dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen bersama untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan, memobilisasi sumber daya yang diperlukan, dan melaksanakan program-program yang efektif.

Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, diharapkan konflik agraria dapat dikelola secara efektif dan kontribusi positif terhadap stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Dalam melanjutkan upaya mengatasi konflik agraria dan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional, beberapa langkah konkret perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memperkuat peran lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah. Hal ini mencakup peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus konflik agraria, serta penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil.

Kedua, perlu dilakukan reformasi kebijakan agraria yang mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, perlindungan terhadap tanah adat, serta pemberdayaan ekonomi bagi petani dan petani kecil.

Selanjutnya, pendidikan dan advokasi hukum juga harus ditingkatkan, baik bagi masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan politik yang memberikan pemahaman tentang hak-hak tanah dan tata kelola sumber daya alam, serta advokasi hukum yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengakses keadilan, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi konflik agraria.

Selain itu, perlu adanya mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang efektif dan inklusif. Mekanisme ini dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, potensi konflik dapat dikurangi dan kerjasama antarpihak dapat ditingkatkan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Penting juga untuk mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam penyelesaian konflik agraria. Ini termasuk mempertimbangkan dampak konflik terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan pangan, serta mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kerjasama regional dan internasional juga dapat menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik agraria. Pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas negara dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan memperkuat kapasitas dalam mengatasi konflik agraria.

Dengan mengambil langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan konflik agraria dapat diatasi secara efektif dan dampak negatifnya terhadap stabilitas politik nasional dapat dikurangi. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam tata kelola sumber daya alam.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, analisis konflik agraria menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam tata kelola sumber daya alam, terutama dalam konteks kepentingan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Konflik agraria tidak hanya terkait dengan pertikaian antara berbagai pihak terkait tanah, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang meluas dalam masyarakat. Implikasi dari konflik agraria terhadap stabilitas politik nasional sangat signifikan, karena dapat menyebabkan ketegangan sosial, polarisasi politik, dan bahkan kekacauan politik yang lebih besar.

Melalui analisis konflik agraria, kita dapat mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap konflik tersebut, termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap

tanah dan sumber daya alam, kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, serta kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan petani kecil. Implikasi terhadap stabilitas politik nasional mencakup risiko terjadinya ketegangan antarberbagai pihak yang terlibat dalam konflik, potensi terjadinya pergeseran politik, serta ancaman terhadap legitimasi pemerintah.

Untuk mengatasi konflik agraria dan meminimalkan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret termasuk penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus konflik agraria, reformasi kebijakan agraria yang mengutamakan kepentingan masyarakat, pendidikan politik dan advokasi hukum bagi masyarakat lokal, pengembangan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang inklusif, serta kerjasama regional dan internasional dalam pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas negara.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Ini akan mendukung terciptanya stabilitas politik nasional yang lebih kuat dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf. io/3jpd*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.

- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.

- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). *SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.